

**PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KORUPSI MELALUI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA (STUDI EMPIRIS TAHUN 2021 – 2023)**

TESIS

Oleh

**DESRIANI HADI
NPM 2321031036**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KORUPSI MELALUI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA (STUDI EMPIRIS TAHUN 2021 – 2023)**

Oleh

DESRIANI HADI

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KORUPSI MELALUI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA REPUBLIK INDONESIA (STUDI EMPIRIS TAHUN 2021 – 2023)

Oleh

DESRIANI HADI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga di Republik Indonesia selama periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder, terdiri atas 132 sampel Kementerian/Lembaga yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan Eviews 13 untuk menguji pengaruh langsung, dan dilanjutkan dengan uji Sobel untuk menguji pengaruh tidak langsung atau mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan TLHP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Temuan Audit juga terbukti berpengaruh positif terhadap Korupsi, sementara TLHP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Korupsi. Selain itu, Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Korupsi dan tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Temuan Audit maupun TLHP terhadap Korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas administratif melalui perbaikan kualitas laporan keuangan, namun belum cukup memengaruhi praktik korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan pengendalian internal, pengawasan, serta strategi pencegahan korupsi yang lebih komprehensif di sektor publik.

Kata Kunci: Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kualitas Laporan Keuangan, Korupsi.

ABSTRACT

The Effect of Audit Findings and Follow-up on Audit Results on Corruption through the Quality of Financial Statements of Ministries/Agencies in the Republic of Indonesia: An Empirical Study for 2021–2023

By

DESRIANI HADI

The purpose of this study is to analyze the effect of Audit Findings and Follow-up on Audit Results on Corruption through the Quality of Financial Statements in Ministries/Agencies in the Republic of Indonesia during the period 2021 - 2023. This study employs a quantitative approach using secondary data, comprising 132 Ministries/Agencies selected through purposive sampling. The analysis was conducted using panel data regression in Eviews 13 to examine direct effects, followed by the Sobel test to assess indirect or mediating effects. The results indicate that Audit Findings negatively affect the Quality of Financial Statements, while TLHP positively affects the Quality of Financial Statements. Audit Findings also have a positive effect on Corruption, whereas TLHP does not have a significant effect on Corruption. Furthermore, the Quality of Financial Statements does not affect Corruption and does not serve as a mediator in the relationship between either Audit Findings or TLHP and Corruption. These findings suggest that audit mechanisms and the follow-up of audit results are more effective in enhancing administrative accountability through improvements in the quality of financial statements, yet they are insufficient to influence corrupt practices within Ministries/Agencies. This study provides important implications for strengthening internal control, oversight, and more comprehensive anti-corruption strategies in the public sector.

Keywords: *Audit Findings, Follow-up on Audit Findings, Financial Reporting Quality, Corruption.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP
KORUPSI MELALUI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
REPUBLIK INDONESIA
(STUDI EMPIRIS TAHUN 2021 – 2023).**

Nama Mahasiswa : **Desriani Hadi**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2321031036**
Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Pembimbing I

**Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si.,
Akt., CA., CPA.
NIP 19560620 198603 1 003**

Pembimbing II

**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si.,
Akt.
NIP 19710802 199512 2 001**

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

**Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.
NIP 19790721 200312 2 002**

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

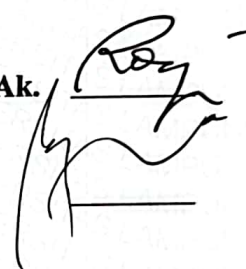
Ketua : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA.



Sekretaris : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.



Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.



Anggota Penguji : Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



3. Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 12 Januari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desriani Hadi

NPM : 2321031036

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia (Studi Empiris Tahun 2021 – 2023)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026



Desriani Hadi

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Desriani Hadi, dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 15 Desember 1994. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Yunus Fiscal dan Ibu Reliani. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sukarame pada tahun 2006. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Sarjana (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung tahun 2015 serta lulus sebagai lulusan terbaik dengan predikat "*Cumlaude*" dengan IPK 3,93 pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung periode 2023.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, penulis mulai aktif bekerja dan menjalani kegiatan profesional di dunia kerja. Di tengah kesibukan tersebut, penulis tetap berupaya mengembangkan kemampuan akademik dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang di mulai pada tahun 2023.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : Fa inna ma ‘al- ‘usri yusrâ, inna ma ‘al- ‘usri yusrâ.”

“It will pass, everything you`ve gone through it will pass.”

“Allah tidak menyegerakan sesuatu kecuali itu yang baik, dan tidak pula melambat-lambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik.”

“Let your dreams be bigger than your fears.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang senantiasa telah diberikan.

Atas izin dan pertolongan-Nya, setiap langkah dalam proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini dapat dilalui, meskipun tidak selalu mudah. Dalam setiap kelelahan dan keterbatasan, Allah SWT selalu hadir memberi jalan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung.

Tesis ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan ketulusan kepada:

Diriku sendiri..

Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Di balik keraguan, kelelahan, dan kesunyian proses yang dilalui, ada keteguhan yang perlahan tumbuh. Setiap doa yang terpanjat dalam sunyi dan setiap usaha yang dijalani dengan sabar, kini menjelma menjadi bukti bahwa aku mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.

Kedua orangtuaku tercinta,

Bapak Yunus Fiscal dan Ibu Reliani..

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah hilang oleh jarak maupun waktu. Kepada Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tak pernah putus yang selalu dipanjatkan untuk bisa menguatkan setiap langkah penulis. Serta kepada Bapak tercinta yang telah kembali ke Rahmatullah, setiap nasihat dan keteladanan yang pernah diberikan akan terus hidup dan menjadi penuntun dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah Bapak, mengampuni segala dosa, menerima segala amal ibadah, dan menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin Allahuma Aamiin.

Kakak-kakakku dan semua keponakanku tersayang..

Terima kasih atas doa yang senantiasa terpanjat, dukungan yang tulus, serta kehadiran yang tanpa lelah menguatkan setiap langkah perjalanan ini. Keponakan-keponakan uncu tersayang yang selalu menjadi pengingat akan harapan dan masa depan, sekaligus sumber semangat yang menumbuhkan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang diberikan dengan ketulusan tanpa batas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup bagi keluarga kita. Aamiin Allahuma Aamiin.

Semua orang baik yang telah hadir dalam hidupku..

Terima kasih telah menjadi bagian tak tergantikan dari perjalanan hidup di jenjang Magister. Untuk kalian yang selalu hadir di saat suka maupun duka, yang membuat setiap hari belajar terasa ringan dengan tawa, cerita, dan kebersamaan. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, teman berbagi canda tawa dan air mata, serta teman yang saling mendukung hingga sampai di titik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud rasa syukurku, dan semoga setiap kebaikan yang kalian tebarkan kembali kepada kalian dalam bentuk kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan. Semoga kenangan indah dan semua orang baik yang hadir dalam hidupku ini tetap terjaga, menjadi bagian dari cerita yang tak pernah pudar.

Dosen dan Staff FEB Universitas Lampung..

Terima kasih yang sebesar-besarnya aku sampaikan kepada seluruh dosen yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang begitu berharga dalam hidupku. Terima kasih juga kepada staf dan seluruh civitas akademika Magister Ilmu Akuntansi serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Semoga karya kecil ini tidak hanya menjadi bukti perjalanan akademikku, tetapi juga bisa menjadi langkah yang bermanfaat dan memberikan makna bagi diriku sendiri maupun bagi siapa pun yang membaca.

Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa tesis yang berjudul “Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia (Studi Empiris Tahun 2021–2023)”. Tesis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, serta memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi (M.Ak.). Proses penyusunan tesis ini telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh pembelajaran, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dan mempertahankannya dalam sidang tesis yang telah dilaksanakan pada 12 Januari 2026. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

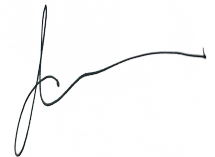
1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyelesaian tesis ini.

5. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Penguji Utama, atas saran dan masukan yang membangun terhadap tesis ini, serta segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
6. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak., selaku Anggota Penguji, atas saran dan masukan yang membangun terhadap tesis ini, serta segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA., selaku Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
9. Teristimewa kepada Cinta Pertamaku, almarhum Bapak Yunus Fiscal tercinta. Beliau memang tidak sempat menemani dalam perjalanan penulisan tesis ini, namun semasa hidupnya beliau menjadi sosok panutan dan inspirasi yang tak tergantikan. Beliau juga menanamkan semangat pendidikan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan tesis ini.
10. Teruntuk pintu surgaku, Ibu Reliani tercinta. Sosok yang sangat berperan penting bagi penulis, atas doa yang tak pernah putus, cinta dan kasih sayang yang tulus, serta kekuatan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.
11. Nenek Rosani yang dengan doa, cinta, dan ketulusan tanpa henti menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kakak-kakak yang penulis sayangi, Masayu Suci Firdayuni, Hary Agus, Yufrizal Hadi, Muhammad Iqbal Jalaluddin, Astrid Faradisty, dan Ucie Ardhika, atas doa dan semangat yang selalu diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
13. Semua keponakan tersayang, Masagus Kun Abdullah Eryan, Nyayu Danastri Kaiswaran, Masagus Auf Abdurrahman Albarru, Masagus Yaqdhan Fiscal Ramadanfield, Kiagus Dipaestu Jabir Gianandra, dan Masayu Fayakun Abdillah Humaira, terima kasih atas keceriaan dan kasih sayang yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis.
14. Keluarga Besar M.A. Hadi Agoes dan Keluarga Besar Sohari, atas doa dan dukungan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

15. Seluruh pihak yang telah memberikan kebaikan, para sahabat, rekan kerja, serta seluruh teman Magister Ilmu Akuntansi angkatan 2023, atas semangat dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga tesis ini dapat diselesaikan.
16. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada seseorang yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, yaitu diriku sendiri Desriani Hadi. Terima kasih telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala kesulitan yang terjadi. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang berani dan bertanggung jawab atas setiap langkah yang dipilih. Teruslah belajar dan jangan pernah berhenti hingga sampai di puncak yang paling tinggi, berbahagialah dimanapun berada, rayakanlah apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu sebagai sosok yang bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri dan orang-orang disekitarmu. Semoga setiap langkahmu selalu diberikan kekuatan dan selalu dikelilingi orang-orang baik. Aamiin Allahuma Aamiin..

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi para pembaca. Dan semoga tesis ini bisa menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026



Desriani Hadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
MENGESAHKAN.....	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Agensi.....	10
2.2 Korupsi	12
2.3 Temuan Audit.....	14
2.3.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	15
2.3.2 Ketidakpatuhan Perundang-undangan.....	16

2.4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.....	16
2.5	Kualitas Laporan Keuangan	17
2.6	Penelitian Terdahulu	20
2.7	Kerangka Penelitian.....	35
2.8	Pengembangan Hipotesis.....	35
2.8.1	Pengaruh Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan...	35
2.8.2	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	36
2.8.3	Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi	37
2.8.4	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi....	38
2.8.5	Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan	39
2.8.6	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan	40
2.8.7	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Korupsi	42
III.	METODE PENELITIAN	44
3.1	Jenis dan Sumber Data	44
3.2	Populasi dan Sampel.....	44
3.2.1	Populasi	44
3.2.2	Sampel.....	45
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
3.3.1	Variabel Independen dan Pengukuran	46
3.3.2	Variabel Dependen dan Pengukuran	46
3.3.3	Variabel Mediasi dan Pengukuran.....	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5	Metode Analisis Data.....	48

3.5.1	Analisis Deskriptif.....	48
3.5.2	Asumsi Klasik	49
3.5.3	Uji Analisi Jalur (Path Analysis)	50
3.5.4	Interpretasi Analisis Jalur	53
3.5.5	Pengujian Hipotesis.....	54
3.5.6	Uji Sobel.....	55
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1	Data Penelitian.....	57
4.2	Hasil Analisis Data	58
4.2.1	Hasil Statistik Deskriptif	58
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	67
4.3.1	Uji Normalitas	67
4.5.2	Uji Multikolinearitas	69
4.5.3	Uji Autokorelasi	69
4.5.4	Uji Heteroskedastisitas	70
4.4	Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel.....	72
4.5	Analisis Regresi Data Panel	75
4.6	Analisis Hasil Uji Ketetapan Model (<i>Goodness of Fit</i>).....	78
4.6.1	Uji Koefisien Determinasi.....	78
4.7	Hasil Uji Hipotesis.....	79
4.8	Hasil Uji Sobel.....	81
4.9	Hasil Uji Analisis Jalur	82
4.10	Pembahasan	83
4.10.1	Pengaruh Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan...	83
4.10.2	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	86

4.10.3	Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi.	89
4.10.4	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi....	93
4.10.5	Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan	95
4.10.6	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan	100
4.10.7	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Korupsi	103
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1	Kesimpulan	12406
5.2	Keterbatasan	108
5.3	Saran	110
5.3.1	Saran Praktis bagi Kementerian/Lembaga	110
5.3.2	Saran bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	111
5.3.3	Saran bagi Penelitian Selanjutnya	112
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel	57
Tabel 4.2 Hasil Olah Analisis Deskriptif.....	58
Tabel 4.3 Tabulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga tahun 2021 sampai dengan 2023.....	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Sub Struktural I	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Sub Struktural II.....	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Sub Struktural I	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Sub Struktural II	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Sub Struktural I.....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi Sub Struktural II	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Chow Model Sub Struktural I	72
Tabel 4.11 Hasil Uji Chow Model Sub Struktural II.....	73
Tabel 4.12 Hasil Uji Lagrange Multiplier Sub Struktural I.....	74
Tabel 4.13 Hasil Uji Lagrange Multiplier Sub Struktural II	75
Tabel 4.14 Analisis Regresi Data Panel Sub Struktural I	76
Tabel 4.15 Analisis Regresi Data Panel Sub Struktural II.....	77
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sub Struktural I	78
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sub Struktural II.....	79
Tabel 4.18 Hasil Uji t Sub Struktural I.....	79
Tabel 4.19 Hasil Uji t Sub Struktur II	80
Tabel 4.20 Hasil Uji Sobel	81
Tabel 4.21 Hasil Uji Analisis Jalur	82

DAFTAR GAMBAR

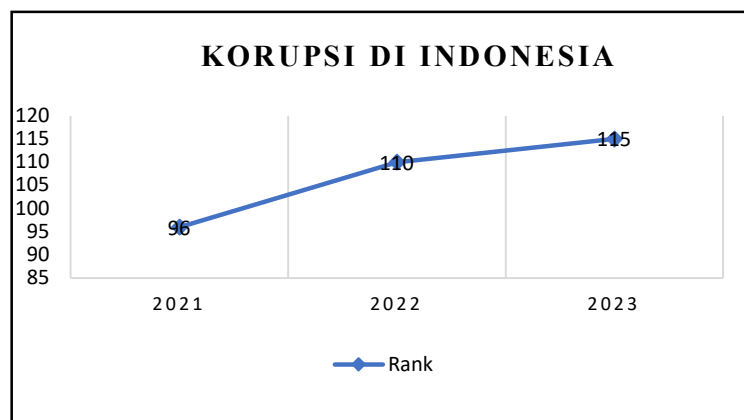
Gambar 1.1 Corruption Perceptions Index.....	1
Gambar 1.2 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	2
Gambar 1.3 LHP atas L/K Pemerintah Pusat 2021 – 2024	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 3.1 Model Analisis Jalur	52
Gambar 4.1 Data Hasil Tabulasi Temuan Audit atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga RI tahun 2021 s.d. 2023.....	60
Gambar 4.2 Data Hasil Opini Audit pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia tahun 2021 s.d. 2023.....	65
Gambar 4.3 Data Kasus Korupsi yang terjadi pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia tahun 2021 s.d. 2023.....	67
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sub Struktural I	71
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sub Struktural II.....	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, salah satunya di negara Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan sektor swasta tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi dan keuangan negara. Salah satu bahaya terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara adalah korupsi. Definisi ini mencakup berbagai praktik seperti suap, pemerasan, penggelapan, penyuapan, dan konflik kepentingan (*Transparency International, 2023*). *Transparency International* (TI) merupakan lembaga internasional yang selama ini mengawasi kasus korupsi di seluruh dunia. *Transparency International* meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI).

Dalam tiga tahun terakhir telah tergambar bahwa Negara Indonesia mengalami kecenderungan naik dalam peringkat korupsi di *Corruption Perception Index* (CPI), dimana semakin naik peringkat yang diraih maka dapat dinilai bahwa peningkatan atas korupsi yang terjadi di Indonesia semakin bertambah.



Gambar 1.1
Corruption Perceptions Index

Data yang diolah 2024

Isu mengenai korupsi di Indonesia merupakan isu yang tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Di sektor pemerintahan, korupsi sering kali terjadi dalam

berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana publik, suap, dan nepotisme. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagi statistik data Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Instansi Pemerintahan Indonesia, pada gambar 1.2 dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir tergambar bahwa Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Kementerian/Lembaga di Indonesia mengalami kecenderungan naik secara signifikan.



Gambar 1.2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Data diolah 2024

Berdasarkan data pada gambar di atas, terdapat tiga entitas pemerintahan yang menunjukkan tren peningkatan kasus tindak pidana korupsi (TPK) dalam tiga tahun terakhir, yaitu Kementerian/Lembaga dengan total 97 kasus, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) sebanyak 54 kasus, serta Pemerintah Provinsi dengan jumlah 43 kasus. Dengan demikian, kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang paling banyak terjadi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya terdapat pada instansi pemerintahan di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Kementerian/Lembaga di Indonesia yaitu kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama dua pejabat lainnya, yakni Sekretaris Jenderal Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp44,5 miliar dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Praktik pemerasan tersebut diduga dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pengumpulan dana dari pejabat eselon I untuk kepentingan pribadi menteri. Selain itu, KPK juga mengungkap kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang melibatkan penerimaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api selama periode 2018–2022. Proyek tersebut mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta lintas Jawa–Sumatera. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 25 orang dan menyita sejumlah barang bukti dengan total nilai setara Rp2,823 miliar. Pada tahun 2023, KPK menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengondisian hasil pemeriksaan perpajakan. Gratifikasi diduga diterima dari sejumlah wajib pajak dan dikaitkan dengan penggunaan jasa perusahaan miliknya sendiri, PT Artha Mega Ekadhana. KPK menyetorkan total Rp40,5 miliar ke kas negara dari hasil uang pengganti dan rampasan terkait perkara ini. Selanjutnya, pada tahun 2024, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015. Kasus ini terkait kebijakan penunjukan koperasi TNI–Polri sebagai pengendali harga gula yang dinilai menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara hingga Rp578 miliar. (Kompas.com). Berbagai kasus yang telah diuraikan di atas mencerminkan fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan instansi pemerintahan di tingkat Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini mencakup semua unsur keuangan negara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemberian opini audit BPK adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penyajian pos Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, institusi pusat dan daerah dapat menyampaikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya yaitu publik atau masyarakat. (L.I., 2020).



Gambar 1.3

LHP atas L/K Pemerintah Pusat 2021 – 2023

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan sebanyak 84 opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 4 opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2021, 82 opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 1 opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2022, serta 82 opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 3 opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2023 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, dapat di artikan bahwa hampir seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, maka kualitas laporan keuangan dianggap telah disajikan dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan mencerminkan

transparansi serta akuntabilitas suatu institusi.

Menurut Penelitian Cohen dan Sayag (2010) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik berperan penting dalam mendorong tata kelola yang baik dan mencegah penggelapan atau penyalahgunaan sumber daya. Namun pada penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada penelitian yang menyatakan bahwa opini audit yang baik (misalnya Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) dapat mengurangi tingkat korupsi. Penelitian Suhardjanto *et al.* (2018) telah membuktikan bahwa opini auditor adalah salah satu tolak ukur untuk menilai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Hal itu dianggap opini audit yang baik mencerminkan kualitas laporan keuangan yang baik. Namun, di sisi lain, ada juga penelitian yang justru menemukan bahwa opini audit yang baik tidak menjamin rendahnya korupsi. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga di Indonesia, hal ini dapat dijelaskan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di luar dan tidak tercermin dalam pencatatan kegiatan atau transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti suap dan gratifikasi. (Budiman & Amyar, 2021). Hasil penelitian Isnadiva & Haryanto (2021) juga menyampaikan bahwa opini pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap korupsi, hal ini menjelaskan bahwa opini yang baik (WTP) tidak mencerminkan bahwa laporan keuangan tersebut bersih dari kasus penyelewengan/korupsi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa belum ada kesimpulan yang jelas mengenai hubungan antara opini audit dan tingkat korupsi. Bahkan, dalam beberapa kasus Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap terlibat dalam kasus korupsi. Artinya, masih dibutuhkan cara lain untuk mengukur dan mengawasi korupsi secara lebih akurat, yaitu temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Menurut Sawyer *et al.* (2003) temuan audit adalah persoalan penting yang ditemukan selama proses audit dan harus disampaikan kepada entitas yang diaudit, karena temuan tersebut dapat memengaruhi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan. Namun, hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh temuan audit terhadap korupsi masih menunjukkan

hasil yang belum konsisten. Penelitian Rini & Damiati (2017) menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini dikarenakan temuan audit termasuk temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal yang bukan merupakan suatu pelanggaran dan tidak menimbulkan kerugian berupa materil dalam keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak temuan audit, maka semakin rendah tingkat korupsi karena meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan. Berbeda dengan hasil penelitian Kiswanto *et al.* (2019) dan Isnadiva & Haryanto (2021) yang menemukan bahwa temuan audit atas efektifitas penyelenggaraan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berhubungan positif dengan jumlah kasus korupsi. Hal yang sama juga terjadi pada tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Hasil penelitian Budiman & Amyar (2021) menemukan bahwa pelaksanaan rekomendasi audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kasus korupsi di kementerian dan lembaga di Indonesia. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di luar dan tidak tercermin dalam pencatatan kegiatan atau transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti suap atau gratifikasi. Sementara itu, rekomendasi audit yang diberikan tidak selalu terkait dengan korupsi. Terdapat tiga kelompok temuan yang menjadi dasar pemberian rekomendasi audit, yaitu kelemahan sistem pengendalian intern, potensi kerugian negara, dan temuan administratif. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan penyimpangan administratif bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Tiurmaida *et al.* (2021) bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada pemerintah pusat di Indonesia.

Kualitas laporan keuangan pada Kementerian/Lembaga memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak-pihak yang memberikan atau berperan dalam proses pinjaman, serta pemerintah. Demikian juga dukungan terhadap teori keagenan, yaitu melalui penyediaan dan pengungkapan informasi akuntansi dalam laporan keuangan, diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara para pihak. (Watts & Zimmerman, 2006).

Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Dengan demikian, ketika laporan keuangan disusun dengan baik, efek positif dari temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pengurangan korupsi menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika kualitas laporan keuangan rendah, maka temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan mungkin tidak berdampak signifikan terhadap praktik korupsi. Namun demikian, belum ada ditemukan penelitian yang mengkaji pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi dengan mempertimbangkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediasi, terutama pada lingkup sektor publik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji bagaimana temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat korupsi, baik secara langsung maupun melalui kualitas laporan keuangan, dalam kaitannya dengan teori agensi. Hal ini sangat menarik bagi penulis karena pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan mampu mempengaruhi korupsi melalui kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memilih judul **“Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Korupsi Melalui Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia (studi empiris tahun 2021 – 2023).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi?
4. Apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi ?
5. Apakah temuan audit secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan ?

6. Apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan ?
7. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi.
4. Untuk menganalisis pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi.
5. Untuk menganalisis pengaruh temuan audit secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan.
6. Untuk menganalisis pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan.
7. Untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai adanya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi, dengan melalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi, khususnya pada Instansi Pemerintahan Kementerian/Lembaga di Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Penulis : untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi, dengan kualitas laporan keuangan sebagai mediasi pada Instansi Pemerintahan Kementerian/Lembaga di Republik Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah : sebagai masukan dalam mendukung temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas laporan keuangan yang baik dalam upaya mengurangi korupsi di seluruh Instansi Pemerintahan Indonesia.
- c. Bagi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung : sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi merupakan salah satu landasan teoritis dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi, yang secara khusus membahas tentang relasi kontraktual antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi tugas (prinsipal) dan pihak pelaksana tugas (agen), yang dalam konteks sektor publik adalah antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah (Kementerian/Lembaga) sebagai agen. Teori ini menyatakan bahwa agen dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah, khususnya instansi seperti kementerian dan lembaga, untuk mengelola keuangan negara serta menjalankan fungsi pelayanan publik. Lalu agen dalam hal ini, adalah pihak birokrasi atau aparatur negara yang bertugas untuk merealisasikan kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

Hubungan antara prinsipal dan agen tidak lepas dari berbagai potensi konflik, terutama karena adanya perbedaan tujuan serta informasi yang dimiliki.

Sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2018), menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama dalam hubungan agensi adalah konflik kepentingan yang diperparah oleh adanya asimetri informasi. Agen, sebagai pelaksana kebijakan, memiliki informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi internal organisasi, penggunaan anggaran, serta proses operasional dibandingkan dengan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini membuka peluang bagi agen untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari mandat yang diberikan, seperti melakukan manipulasi laporan, mengambil keuntungan pribadi, hingga terlibat dalam praktik korupsi. Dalam situasi seperti ini, kepentingan prinsipal dapat terabaikan karena agen tidak bertindak sesuai dengan tujuan awal kontrak.

Teori agensi kerap dikaitkan dengan asimetris informasi (*information asymmetry theory*) ketika terdapat kecurangan antara agen kepada prinsipal. Asimetri inilah

yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensi adanya *agency problem* pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teori agensi penting sejalan dengan pertumbuhan pasar modal dunia, dimana agen yang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan, yang digambarkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan yang telah diaudit. Diperlukan kerjasama oleh agen dan prinsipal untuk menjalankan masing-masing fungsinya dengan baik. Dalam teori keagenan menyebutkan bahwa pemerintah sebagai agen mendapat pengawasan oleh DPRD, prinsipal memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja agen (Jensen & Meckling, 1976).

Untuk meminimalkan konflik tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang transparan. Laporan keuangan menjadi instrumen utama bagi agen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada prinsipal. Dalam kerangka ini, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui audit berperan penting untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan publik. Lebih dari sekadar menilai kesesuaian terhadap aturan, audit eksternal juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Eisenhardt, 1989). Di sinilah pentingnya pemeriksaan sebagai salah satu hal utama dalam sistem *checks and balances* antara rakyat dan pemerintah. Temuan audit yang objektif dan tindak lanjut yang tepat terhadap rekomendasi audit dapat menjadi indikator sejauh mana agen menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Di sisi lain, keberadaan laporan keuangan yang berkualitas juga memiliki peran strategis dalam memperkuat pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, akurasi, dan relevansi informasi tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan suatu entitas, tetapi juga menjadi cerminan akuntabilitas manajerial dari pejabat publik yang mengelola anggaran. Dengan memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai bagaimana dana

publik digunakan, masyarakat berhak menilai sejauh mana lembaga pemerintah mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, audit eksternal dan laporan keuangan yang berkualitas merupakan dua elemen krusial dalam membangun sistem pengawasan yang efektif guna mencegah penyimpangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

2.2 Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin: “*corruptio*” atau *corruptus*. Secara harafiah, kata korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, bertentangan dengan kesucian (Hamzah, 2007). Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, memberikan keuntungan kepada orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan yang melekat padanya. Tindakan tersebut berdampak pada timbulnya kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan demikian, korupsi dalam konteks hukum nasional tidak hanya mencakup penggelapan atau penyelewengan dana publik, tetapi juga menyangkut setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup perilaku seperti suap, gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan anggaran, hingga pengambilan keputusan yang merugikan negara karena didorong oleh motif pribadi. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan yang tegas, menyeluruh, dan sistemik. Oleh karena itu, regulasi seperti UU No. 31 Tahun 1999 hadir sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku korupsi sekaligus mendorong praktik pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

Konsep dasar korupsi yang disampaikan oleh Arifin (2024) adalah langkah pertama yang penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan mengidentifikasi apa yang termasuk dalam tindakan korupsi, bagaimana korupsi terjadi, dan siapa yang biasanya terlibat. Adapun konsep dasar korupsi,

mencakup definisi, jenis-jenis korupsi, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi yaitu:

1. Suap (*Bribery*)

Suap merupakan bentuk korupsi yang diatur dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yaitu dengan terjadinya tindakan memberi atau menerima hadiah, uang, atau janji secara melawan hukum untuk memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik, yang merusak keadilan, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Penggelapan (*Embezzlement*)

Tindakan mengambil atau menggunakan uang atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Menurut Pasal 08 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , penggelapan dalam jabatan terjadi ketika pegawai negeri atau pihak lain yang diberi kewenangan publik, baik sementara maupun tetap, dengan sengaja menyalahgunakan posisi atau wewenangnya untuk menguasai, membiarkan, atau membantu pihak lain mengalihkan dana atau aset yang seharusnya dikelola bagi kepentingan negara atau masyarakat.

3. Pemerasan (*Extortion*)

Menurut Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 pemerasan dalam tindak pidana korupsi merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau pihak berpengaruh dengan cara menekan atau memaksa pihak lain, baik secara langsung maupun terselubung, untuk memberikan uang, fasilitas, atau keuntungan tertentu. Praktik ini dilakukan tidak secara sukarela oleh pihak yang dipaksa, melainkan karena adanya ancaman, tekanan, atau kekhawatiran atas dampak negatif bila permintaan tersebut ditolak.

4. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 terjadi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga

menimbulkan pertentangan antara tanggung jawab profesional dan kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan publik.

5. Nepotisme (*Nepotism*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa nepotisme merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memberikan keuntungan kepada keluarga, teman dekat, atau kelompok tertentu, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. (Pemerintah Indonesia, 1999)

2.3 Temuan Audit

Temuan audit menurut Sawyer et al. (2003) adalah masalah penting yang ditemukan selama proses audit dan harus disampaikan kepada pihak yang diaudit. Temuan ini bisa menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian, audit dan perlu disampaikan kepada entitas yang diaudit karena dapat mempengaruhi perbaikan dan peningkatan kinerja, efisiensi, dan efektivitas secara ekonomis. Ketidakpatuhan terhadap aturan karena temuan ini dapat berdampak besar terhadap kinerja dan keberhasilan organisasi, maka sangat penting untuk segera dikomunikasikan. Apabila temuan tersebut bersifat material atau berdampak besar, maka organisasi perlu segera mengambil tindakan agar masalah tidak berlanjut. Dengan demikian, temuan audit bukan hanya berisi kritik, tetapi juga memberikan masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi.

Temuan audit merupakan masalah-masalah material yang ditemukan pemeriksa selama proses audit berlangsung dan masalah tersebut penting untuk dikomunikasikan dengan instansi (*auditee*). Hal ini sehubungan dengan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada pemeriksaan atas laporan keuangan, temuan audit yang diungkapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yaitu temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. (BPK RI, 2017). Berikut merupakan faktor-faktor dari temuan audit yaitu:

2.3.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengembangkan sebuah model dalam menilai pengendalian intern. Model ini kemudian dijadikan sebagai kerangka kerja dan dikenal sebagai standar dalam mengukur efektivitas sistem pengendalian intern. Kerangka kerja ini terdiri lima komponen yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*). Arens *et al.* (2017) dalam buku *Auditing and Assurance Services* menyebutkan bahwa pengendalian internal didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai dan untuk mendukung tercapainya keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum. Selain memberikan pernyataan opini atas kewajaran laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkapkan temuan terkait kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Dalam proses pemeriksaan, auditor BPK diharuskan menggunakan pertimbangan profesionalnya secara cermat untuk menilai apakah suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan, sehingga layak untuk dilaporkan sebagai temuan audit. Temuan audit terkait kelemahan pengendalian ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dimana mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.
2. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dimana mengungkapkan kelemahan pengendalian terkait pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern, dimana mengungkapkan kelemahan terkait ada-tidaknya struktur pengendalian intern atau

efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

2.3.2 Ketidakpatuhan Perundang-undangan

Selain menyajikan kelemahan sistem pengendalian internal, pemeriksa BPK juga harus melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Pemeriksa harus dapat merancang pemeriksaan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi salah saji yang disebabkan oleh ketidakpatuhan perundang-undangan. Temuan audit ini dikelompokkan lebih rinci menjadi:

1. Temuan kerugian negara/daerah, dimana mengungkapkan permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Temuan potensi kerugian negara/daerah, dimana mengungkapkan adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang, berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
3. Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah, dimana mengungkapkan adanya penerimaan yang telah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
4. Temuan administrasi, dimana mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara/daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

2.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan

hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pejabat yang memeriksa mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK lengkap dengan jawaban dan penjelasan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat direkomendasi.

Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan merupakan bentuk akuntabilitas entitas publik dalam menjawab rekomendasi pemeriksa atas kelemahan sistem pengendalian internal atau penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kata lain, TLHP menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah, kementerian, atau lembaga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan perbaikan kinerja keuangan (Mardiasmo, 2018). Arens, Elder, dan Beasley (2017) menjelaskan bahwa efektivitas tindak lanjut audit tidak hanya dilihat dari adanya respons formal terhadap rekomendasi, tetapi juga dari implementasi kebijakan atau perbaikan prosedur yang bersifat substantif. Dalam konteks sektor publik, tindak lanjut ini diharapkan dapat memperkecil peluang berulangnya kesalahan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan memperkuat akuntabilitas aparatur negara. Selain itu, Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan secara konsisten menunjukkan adanya kemauan dan kemampuan institusi publik dalam memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem keuangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkualitas merupakan bukti bahwa hasil pemeriksaan bukan hanya dokumentasi administratif, melainkan alat penggerak reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Bastian, 2010).

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif berikut:

- Relevan
Informasi dalam laporan keuangan harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), serta disajikan tepat waktu sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan pengguna.
- Andal
Informasi dikatakan andal apabila bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat diverifikasi. Keandalan menunjukkan bahwa informasi mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- Dapat Dibandingkan
Laporan keuangan harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan kinerja keuangan antarperiode maupun antarentitas pemerintah.
- Dapat Dipahami
Informasi keuangan harus disajikan dalam bentuk dan istilah yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai mengenai aktivitas pemerintahan dan keuangan.

Laporan yang berkualitas mencerminkan bahwa Kepala Daerah telah menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam mengelola organisasi pemerintah. Secara umum, kualitas dapat diartikan sebagai penilaian terhadap hasil dari suatu unit kerja, baik dalam bentuk barang maupun kegiatan yang dilakukan. Salah satu unsur penting dalam kualitas informasi laporan keuangan adalah kemudahan bagi pengguna untuk memahaminya. Dalam hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan dasar mengenai kegiatan ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta memiliki keinginan untuk mempelajari informasi tersebut dengan sungguh-sungguh. Meskipun begitu, informasi yang penting dan kompleks tetap harus disajikan dalam laporan keuangan, dan tidak boleh

dihilangkan hanya karena dianggap sulit dipahami oleh sebagian pengguna. (Roviyantie, 2011).

Kualitas laporan keuangan memegang peranan penting dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang disusun secara berkualitas mencerminkan adanya tanggung jawab dan komitmen atas informasi yang disajikan kepada publik. Salah satu alat penting yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP memungkinkan informasi keuangan dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan di sektor pemerintahan, sekaligus mendorong keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Selain itu, SAP memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian dari upaya sistematis dalam memperbaiki kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Secara umum, kualitas laporan keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kesesuaian dengan SAP, kelengkapan informasi yang diungkapkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas pelaporan. (Yuliani, 2010).

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan mampu memberikan masukan bagi pengguna dalam menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi tersebut juga berguna dalam memperkirakan kondisi keuangan di masa mendatang. Agar dapat menunjang proses pengambilan keputusan, laporan keuangan juga harus disajikan tepat waktu. Keandalan laporan keuangan tercermin dari penyajiannya yang jujur, wajar, dapat diuji kebenarannya, dan disajikan secara lengkap tanpa keberpihakan kepada pihak tertentu. Karakteristik kualitatif lainnya adalah keterbandingan, yaitu kemampuan laporan keuangan untuk dibandingkan baik antar periode maupun antar entitas yang sejenis pada periode yang sama. Kemudian, karakteristik dapat dipahami mengacu pada penyajian informasi dengan format dan istilah yang mudah dimengerti oleh pengguna, termasuk oleh mereka yang berupaya untuk memahami isi laporan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ditentukan oleh

sejauh mana laporan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif serta tingkat kelengkapan dan kewajaran pengungkapannya. (Henny *et al.*, 2021).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah sebagai landasan untuk memahami penelitian ini, sehingga peneliti memiliki acuan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang disusun kedalam tabel berikut untuk memudahkan para pembaca dalam memahami beberapa hasil dari penelitian sebelumnya mengenai Korupsi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	(Rini & Damiati, 2017)	Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi diIndonesia. (Sinta 2)	Dependen : Tingkat Korupsi (Y). Independen: Opini Audit (X ₁), Temuan Audit (X ₂), Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X ₃).	Teori Keagenan	- Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. (-) - Temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. (-) - Tindak lanjut atas rekomendasi audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. (-)
2.	(Furqan <i>et al.</i> , 2020)	<i>The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report</i>	Dependen : Kualitas Pelayanan Publik (Y). Independen: Temuan Audit (X ₁), Tindak	Teori pengelolaan dan pengendalian internal	- Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
		<i>and public service quality in Indonesia.</i> (Scopus Q1)	Lanjut Rekomendasi audit (X ₂). Mediasi : Kualitas Laporan Keuangan.		<p>pelayanan publik. (+)</p> <p>- Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan pelayanan publik. (-)</p> <p>- Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan pelayanan publik (+).</p>
3.	(Kiswanto, Semarang, <i>et al.</i> , 2019)	<i>The Effect of Audit Results and Financial Performance on Corruption Level</i>	Dependen : Tingkat Korupsi (Y). Independen: Temuan Audit (X ₁), Tindak	Teori Agensi dan Teori Sinyal.	- Temuan audit berpengaruh positif terhadap Tingkat korupsi. (+)

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
		<i>Moderated by Government Size.</i> (Scopus Q3)	Lanjut Rekomendasi Audit (X_2), Rasio kemandirian keuangan daerah (X_3), Rasio Aktivitas keuangan daerah (X_4). Moderasi: Ukuran Pemerintah Daerah.		<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut atas rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap Tingkat korupsi. (+) - Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat korupsi. (+) - Rasio Aktivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat korupsi. (+)
4.	(Isnadiva & Haryanto, 2021)	Hasil Pemeriksaan Dan Kasus Korupsi Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi	Dependen: Korupsi (Y). Independen: Opini pemeriksaan (X_1), Temuan pemeriksaan	Teori Agensi dan Teori Atribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Opini pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi. (-)

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
		Di Indonesia Tahun 2015-2018) (Sinta 3)	(X ₂), Tindak lanjut hasil pemeriksaan (X ₃).		- Temuan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap korupsi. (+) - Tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap korupsi. (+)
5.	(Budiman & Amyar, 2021)	<i>The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels within ministries and institutions in the Republic of Indonesia.</i> (Sinta 2)	Dependen : Tingkat Korupsi (Y). Independen: Opini Audit (X ₁), Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X ₂), Temuan Kerugian Negara (X ₃).	Teori Agensi	<u>Parsial :</u> - Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat/kasus korupsi kementerian dan lembaga di Republik Indonesia. (-) - Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					<p>tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat/kasus korupsi kementerian dan lembaga di Republik Indonesia.</p> <p>(-)</p> <p>- Temuan Kerugian Negara sebagian berpengaruh signifikan terhadap tingkat/kasus korupsi di kementerian dan lembaga di Republik Indonesia.. (+)</p>

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					<u>Simultan :</u> Opini audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, dan Temuan Kerugian Negara tidak signifikan mempengaruhi tingkat/kasus korupsi di kementerian dan lembaga di Republik Indonesia. (-)
6.	(Cinintya, 2022)	Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. (Sinta 2)	Dependen : Korupsi (Y). Independen: Transparansi (X ₁), Opini Audit (X ₂), Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X ₃).	Teori Agensi dan Teori Sinyal.	- Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi. (-) - Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap korupsi. (+)

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					- Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi. (-)
7.	(Tresnawati & Nur Apandi, 2016)	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating . (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). (Sinta 2)	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y). Independen: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X ₁), Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (X ₂). Moderasi : Interaksi Antara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.	Teori Agensi	- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (+) - Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (+)

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pengungkapan Laporan Sebagai Variabel Moderating Tingkat Keuangan. (-)
8.	(Setyaningrum & Agustina, 2020)	<i>Determinants Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia.</i> (Scopus Q3)	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y). Independen: Tindak lanjut rekomendasi audit(X ₁), Persaingan politik(X ₂).	Teori Keagenan, Teori Legitimasi dan Teori Kegunaan Keputusan.	- Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (+) - Persaingan politik berpengaruh negatif

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					terhadap kualitas laporan keuangan.(-)
9.	(Tiurmaida <i>et al.</i> , 2021)	<i>Determinant of Indonesia Government Financial Reporting Quality.</i> (Sinta 3)	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y). Independen: Temuan audit (X ₁), Tindak lanjut rekomendasi audit (X ₂).	<i>Agency Theory & Stakeholder Theory</i>	- Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.(-) - Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (+)
10.	(Aminah <i>et al.</i> , 2022)	<i>The effect of the quality of local government financial reports on corruption moderated with the audit findings.</i> (Scopus Q3)	Dependen: Korupsi (Y). Independen: Kualitas Laporan Keuangan (X). Moderasi : Temuan Audit.	Teori Agensi dan Teori Penatalayanan.	- Kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi. (-) - Temuan audit memperkuat

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					hubungan antara kualitas laporan keuangan terhadap korupsi. (+)
11.	(Djanegara <i>et al.</i> , 2017)	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Sinta 2)	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y). Independen: Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan Sistem PI akuntansi dan pelaporan (X ₁) Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan Sistem PI pelaksanaan anggaran (X ₂). Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan Sistem PI struktur pengendalian (X ₃).	<i>Agency Theory & Entity Theory</i>	- Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan Sistem PI akuntansi dan pelaporan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (+) - Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan Sistem PI pelaksanaan anggaran berpengaruh positif

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
			Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan per UU-an (X ₄).		<p>terhadap kualitas laporan keuangan. (+)</p> <p>- Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan Sistem PI struktur pengendalian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (+)</p> <p>- Tindak lanjut perbaikan atas kelemahan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan per UU-an berpengaruh positif</p>

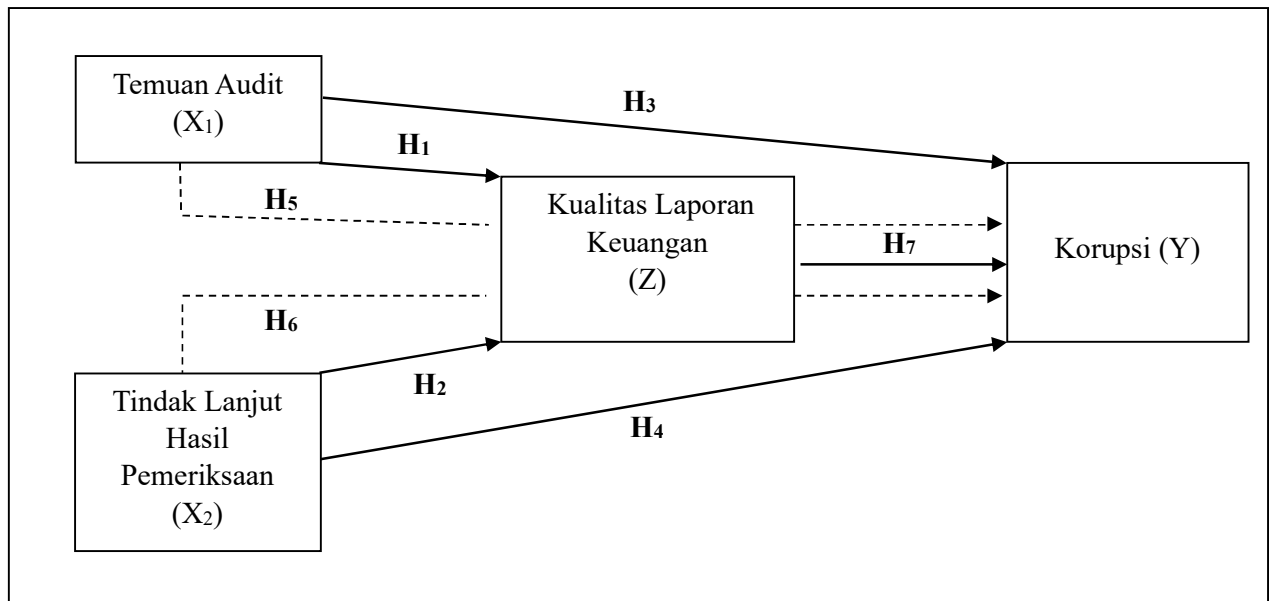
No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					terhadap kualitas laporan keuangan. (+)
12.	(Pertiwi & Wibowo, 2023b)	<i>Government Reporting and Quality of Public Services: Are They Twins?</i> (Sinta 2)	Dependen: Kualitas Pelayanan Publik (Y). Independen: Temuan Audit (X ₁), Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X ₂). Intervening : Kualitas Laporan Keuangan (Z).	Teori Agensi	- Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. - Tindak lanjut atas rekomendasi audit tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
13.	(Din <i>et al.</i> , 2017)	<i>The Follow Up of Auditing Results, Accountability of Financial Reporting and Mediating Effect of Financial Loss Rate: An Empirical Study in</i>	Dependen : Opini Audit (Y) Independen : Tindak Lanjut Hasil Audit (X) Mediasi : Tingkat Kerugian Keuangan (Z)	Teori Legitimasi	- Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh positif terhadap opini audit. (+) - Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
		<i>Indonesian Local Governments.</i> (Scopus Q2)			Tingkat Kerugian Keuangan. (-) - Tingkat Kerugian Keuangan berpengaruh negatif terhadap Opini Audit. (-)
14.	(Angela <i>et al.</i> , 2023)	Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi	Dependen: Tingkat Korupsi (Y). Temuan Audit (X ₁), Opini Audit (X ₂), Tindak Lanjut Hasil Audit (X ₃).	Teori Keagenan	- Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. - Opini Audit berpengaruh secara negatif terhadap Tingkat Korupsi. (-) - Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh signifikan secara

No	Nama dan Tahun	Judul dan Indeks Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
					positif terhadap Tingkat Korupsi. (+)
15.	(Imtinan <i>et al.</i> , 2021)	Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian. (Sinta 2)	Dependen: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian (Y). Independen: Temuan Audit (X ₁), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X ₂).	Teori Agensi	- Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian. (+) - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian. (+)

2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini meliputi temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi yang dimediasi oleh kualitas laporan keuangan. Untuk itu kerangka pikir penelitian ini akan dikembangkan dalam Gambar 2.1 yaitu:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teori Agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel. Namun, seringkali terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat seperti pelaporan keuangan yang tidak akurat atau tidak sesuai standar yang dapat membuka peluang bagi praktik korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. (Jensen & Meckling, 1976). Hasil penelitian Pertiwi & Wibowo (2023) menunjukkan bahwa temuan audit tersebut secara signifikan dan negatif mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin banyak temuan audit pada audit laporan keuangan kementerian/lembaga, semakin kecil kemungkinan mendapatkan opini tanpa pengecualian. Peningkatan jumlah

pelanggaran terhadap ketentuan dalam praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah dapat menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah (Tiurmaida *et al.*, 2021). Berdasarkan teori agen, temuan audit dapat dipahami sebagai indikator lemahnya mekanisme pengawasan terhadap agen, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi temuan audit, semakin besar kemungkinan laporan keuangan yang disajikan mengandung kesalahan material. Dengan kata lain, tingginya jumlah atau tingkat keparahan temuan audit menunjukkan bahwa agen tidak menjalankan fungsinya secara optimal dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga tidak menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.8.2 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan antara *prinsipal* (dalam hal ini masyarakat atau otoritas yang memberikan mandat pengelolaan keuangan negara) dan *agen* (pemerintah pusat atau daerah sebagai pengelola anggaran). Masalah utama dalam hubungan ini adalah asimetri informasi, yaitu agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal dan bisa menyalahgunakan posisinya untuk bertindak tidak sesuai kepentingan prinsipal. Dalam hal ini, salah satu cara untuk meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi adalah melalui audit eksternal oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun audit tidak berhenti pada pemberian opini dan temuan, lalu diperlukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan (TLHP) untuk menyelesaikan temuan audit tersebut. TLHP menjadi indikator penting dalam menilai komitmen dan akuntabilitas agen dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelaporan. Hasil penelitian Tresnawati & Nur Apandi (2016) menyampaikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bentuk respons entitas terhadap rekomendasi auditor guna memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian

tindak lanjut, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena perbaikan atas temuan audit pada periode sebelumnya dapat mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang. Kualitas laporan keuangan merupakan *supply chain* dalam meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (Djanegara *et al.*, 2017).

Dengan mengikuti rekomendasi audit lanjutan, pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hasil penelitian (Setyaningrum & Agustina, 2020) juga mengonfirmasi peran Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui penerbitan rekomendasi yang tepat dan mudah untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang baik dapat secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah :

H2: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.8.3 Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi

Adanya temuan audit menunjukkan bahwa terdapat asimetri informasi antara agen sebagai pemerintah dan masyarakat sebagai prinsipal dapat dimanfaatkan untuk tindakan korupsi, terutama jika sistem pengendalian internal lemah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Ditemukannya berbagai pelanggaran oleh BPK RI mengindikasikan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen. Hasil penelitian Kiswanto *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa temuan audit merupakan salah satu faktor terjadinya korupsi. Kerugian dan potensi kerugian dari temuan ini harus dikembalikan ke kas negara/daerah.

Semakin tinggi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka semakin tinggi pula tingkat korupsi. Temuan audit berbentuk kerugian moneter dan hal-hal serupa yang jumlah pastinya disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan atau kelalaian para pengelola keuangan negara. Oleh karena itu, setiap temuan kerugian negara merupakan indikasi kuat terjadinya kasus korupsi (Budiman & Amyar, 2021).

Pelanggaran korupsi di Indonesia dapat dicerminkan dengan total temuan pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan atas efektivitas penyelenggaraan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan

bahwa hasil penelitian Isnadiva & Haryanto (2021) dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyelewengan / korupsi. Temuan audit yang menunjukkan penyimpangan dalam anggaran atau ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan dapat mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, jika temuan audit tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan yang memadai, hal ini dapat semakin memperburuk tingkat korupsi karena memberikan peluang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan tindakan ilegal. Oleh karena itu, semakin banyak temuan audit yang diidentifikasi, akan semakin tinggi pula kemungkinan adanya tindakan korupsi yang terungkap. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Temuan Audit berpengaruh positif terhadap Korupsi.

2.8.4 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi

Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara antara prinsipal (masyarakat, pemerintah pusat, atau lembaga pengawas) dan agen (kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah) mengandung potensi penyimpangan akibat adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak seimbang. Dalam hal ini, agen memiliki pengetahuan dan kendali atas pengelolaan sumber daya publik, sementara prinsipal memiliki keterbatasan dalam mengawasi secara langsung. Agen memiliki peluang untuk bertindak tidak akuntabel, termasuk melakukan korupsi, apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat dari prinsipal. Situasi ini memunculkan risiko *moral hazard*, yaitu kecenderungan agen untuk bertindak menyimpang ketika kontrol eksternal lemah atau sanksi tidak tegas. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan seperti audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) menjadi alat untuk mengurangi risiko tersebut. Hasil penelitian Rini & Damiati (2017) menemukan bahwa semakin banyaknya tindak lanjut audit yang dilihat dari nilai perkapita yang diserahkan ke kas Negara, menyebabkan menurunnya tingkat korupsi. Hal itu diungkapkan juga oleh Liu & Lin (2012) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi provinsi di China. Semakin banyak rekomendasi audit yang ditindaklanjuti pemerintah, menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah. Salah satu bentuk pengawasan eksternal yang krusial adalah audit keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa, seperti BPK. Namun, audit saja tidak cukup, ada hal yang lebih penting yaitu sejauh mana hasil audit tersebut

ditindaklanjuti secara efektif. Ketika tindak lanjut dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu, maka ruang gerak bagi agen untuk melakukan korupsi semakin sempit karena ada ancaman nyata atas penyimpangan. Sebaliknya, jika TLHP lemah atau diabaikan, maka agen tidak melihat risiko yang cukup untuk menahan diri dari tindakan koruptif. Dengan demikian, kondisi ini menciptakan peluang bagi agen untuk menyalahgunakan kewenangannya, termasuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan teori agensi, tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi variabel kunci yang dapat memengaruhi perilaku koruptif agen. Semakin tinggi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya korupsi karena pengawasan menjadi lebih fungsional. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H4: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap Korupsi.

2.8.5 Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan

Melalui pendekatan teori agensi, hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pejabat publik sebagai agen memunculkan tantangan dalam hal pengawasan, disebabkan oleh ketimpangan informasi (asimetri informasi). Dalam kondisi ini, agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal, yang dapat dimanfaatkan untuk mementingkan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan situasi atau kelemahan sistem, termasuk melakukan penyimpangan atau korupsi. Risiko ini semakin besar apabila mekanisme pelaporan dan pengawasan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, audit eksternal memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menilai kinerja keuangan agen sekaligus mengungkap informasi yang sebelumnya tidak diketahui publik (Jensen & Meckling, 1976).

Temuan audit adalah sebagai output dari proses pemeriksaan, untuk mencerminkan kondisi tata kelola keuangan suatu entitas. Temuan yang bersifat material atau terjadi secara berulang dapat mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, hingga berpotensi terjadinya korupsi dan menyebabkan kerugian negara. Dalam kerangka teori agensi, hal ini menunjukkan bahwa agen tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada prinsipal secara optimal dan akuntabel. Meski demikian,

pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh faktor lain, yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan menggambarkan sejauh mana agen menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, yang menjadi salah satu mekanisme kontrol terhadap perilaku menyimpang agen. Dalam kaitannya dengan temuan audit, entitas yang menindaklanjuti temuan dengan perbaikan sistem dan pelaporan cenderung menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangannya (Furqan *et al.*, 2020). Hal ini menjadi proses transformatif, di mana kelemahan yang terungkap dari audit digunakan sebagai dasar untuk perbaikan akuntabilitas. Sebaliknya, jika temuan audit tidak ditindaklanjuti untuk memperbaiki laporan keuangan, maka laporan tersebut tetap rentan terhadap rekayasa informasi, manipulasi, dan pengaburan fakta, yang memperbesar peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana pengaruh temuan audit dapat menurunkan atau justru tidak berdampak pada korupsi, di mana pengaruh tersebut bergantung pada sejauh mana informasi dari hasil audit dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan. Dengan demikian, berdasarkan logika agensi, semakin banyak temuan audit, kualitas laporan keuangan cenderung menurun, dan penurunan kualitas ini dapat meningkatkan potensi korupsi. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan memainkan peran penting sebagai mediasi antara pengawasan melalui audit dan pengendalian korupsi. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H5: Temuan Audit berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan.

2.8.6 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan

Dalam teori agensi Jensen & Meckling (1976) hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) sering kali menghadapi masalah keagenan yang timbul karena asimetri informasi dan konflik kepentingan. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai pengelolaan keuangan publik, sementara

prinsipal tidak memiliki akses langsung terhadap informasi tersebut. Ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, agen cenderung bertindak oportunistik dan dapat melakukan praktik korupsi yang merugikan publik. Salah satu mekanisme pengawasan eksternal terhadap perilaku agen adalah melalui proses audit keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, audit tidak cukup hanya berhenti pada penemuan masalah, efektivitas pengawasan juga sangat tergantung pada bagaimana agen menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, atau yang dikenal sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). TLHP merupakan bentuk tanggung jawab manajerial agen untuk memperbaiki penyimpangan, menindaklanjuti rekomendasi auditor, dan mencegah terulangnya kesalahan serupa.

Tindak lanjut yang serius terhadap hasil audit menunjukkan bahwa agen memiliki komitmen terhadap transparansi, perbaikan sistem, dan akuntabilitas. Hal ini dapat tercermin dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, baik dari segi kepatuhan terhadap standar akuntansi, keandalan informasi, maupun opini audit yang diperoleh (misalnya opini Wajar Tanpa Pengecualian). Kualitas laporan keuangan yang tinggi menjadi indikator bahwa agen telah memperbaiki kelemahan yang sebelumnya ditemukan, dan telah menyusun informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh prinsipal. (Suhardjanto *et al.*, 2018) Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan bukan hanya sekadar produk administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai alat pengendalian terhadap perilaku koruptif. Sebaliknya, jika TLHP tidak dilaksanakan dengan baik, maka perbaikan tata kelola tidak terjadi, dan kualitas laporan keuangan tetap rendah. Dalam kondisi tersebut, agen tetap memiliki ruang besar untuk menyembunyikan informasi atau melakukan penyimpangan, karena kelemahan sistem tidak pernah diperbaiki. Maka, tanpa perbaikan kualitas laporan keuangan, dampak positif dari TLHP terhadap penurunan korupsi menjadi tidak optimal. Dengan demikian, berdasarkan teori agensi, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berperan sebagai variabel mediasi yang penting dalam memediasi pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap korupsi. TLHP yang baik meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat korupsi melalui

peningkatan akuntabilitas dan transparansi informasi publik. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H6: : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan.

2.8.7 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Korupsi

Dalam kerangka Teori Agensi, hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pejabat publik atau pemerintah) berpotensi menimbulkan masalah agensial, terutama ketika terdapat asimetri informasi dan minimnya mekanisme pengawasan yang efektif. Agen memiliki akses dan kontrol atas informasi keuangan serta aktivitas pengelolaan anggaran, sementara prinsipal kesulitan dalam memverifikasi apakah agen menjalankan tugasnya secara akuntabel dan efisien. Situasi ini memberikan peluang bagi agen untuk bertindak oportunistik, termasuk melakukan manipulasi data, penyimpangan anggaran, dan tindakan korupsi (Jensen & Meckling, 1976).

Laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu sarana formal yang digunakan agen untuk menyampaikan informasi kepada prinsipal. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana informasi yang disampaikan valid, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mendapat opini audit yang baik (misalnya Wajar Tanpa Pengecualian/WTP), serta menyajikan informasi yang dapat dipercaya oleh pengguna laporan (Aminah *et al.*, 2022). Dalam teori agensi, laporan keuangan yang baik dapat mengurangi asimetri informasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas agen di hadapan prinsipal. Sebaliknya, kualitas laporan keuangan yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa agen tidak menyediakan informasi secara terbuka atau akurat, yang memungkinkan praktik-praktik korupsi tidak terdeteksi. Laporan yang disusun dengan buruk atau mengandung penyimpangan sering kali tidak hanya merefleksikan ketidakmampuan teknis, tetapi juga disengaja untuk menutupi penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya menjadi cerminan tata kelola keuangan, tetapi juga sebagai alat deteksi dini atas kemungkinan penyimpangan perilaku agen (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori agensi, semakin

tinggi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh agen, maka semakin rendah peluang terjadinya korupsi. Hal ini karena agen menghadapi tekanan transparansi yang lebih besar dan kemungkinan terdeteksinya penyimpangan juga meningkat. Prinsipal menjadi lebih mampu mengevaluasi kinerja agen secara objektif, sehingga mempersulit agen untuk bertindak menyimpang. Sebaliknya, laporan keuangan yang buruk menciptakan ruang gelap yang dapat dimanfaatkan oleh agen untuk korupsi. Dengan demikian, dalam konteks teori agensi, kualitas laporan keuangan memainkan peran penting dalam mencegah korupsi, karena berkontribusi dalam memperkecil asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas publik. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H7: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh negatif terhadap Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan desain eksplanatori, desain eksplanatori dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh langsung maupun tidak langsung antara variabel bebas dan variabel terikat melalui variabel mediasi. Dalam hal ini, untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen, mediator, dan dependen secara statistik (Hayes, 2017). Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai variabel bebas (*independent*), Korupsi sebagai variabel terikat (*dependent*), dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel mediasi (*intervening*).

Sumber data dan subjek dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak lain melalui metode statistik (Kothari, 2004). Data sekunder yang dianalisis meliputi:

- Data korupsi yang terjadi pada Kementerian/Lembaga di Indonesia selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang di peroleh dari Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Indonesia yang telah di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu sebagai kumpulan semua subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian, populasi merujuk pada seluruh objek yang menjadi dasar penelitian (Kothari, 2004). Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 91 Kementerian/Lembaga yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Data yang digunakan yaitu Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat tahunan, yang diperoleh dari situs www.bpk.go.id untuk periode 2021 sampai dengan 2023.

3.2.2 Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan dan hasil hipotesis penelitian. Dalam hal ini merujuk pada penggunaan kriteria dalam pengambilan sampel peneliti memilih teknik *purposive sampling* (Kothari, 2004). Dalam penelitian ini metode *purposive sampling* menjadi dasar untuk proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi Instansi Pemerintahan Kementerian/Lembaga menjadi sampel dalam penelitian ini. Maka pengambilan sampel yang sudah ditentukan menurut kriteria tertentu, berikut kriteria sampel yang memenuhi dalam penelitian ini yaitu:

- Kementerian/Lembaga yang tercatat memiliki data kasus korupsi selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
- Kementerian/Lembaga yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dan
- Kementerian/Lembaga yang memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Variabel independen (bebas), yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain.
2. Variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independennya.
3. Variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur.

3.3.1 Variabel Independen dan Pengukuran

Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Suliyanto, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah temuan audit yang disebut variabel independen X1 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disebut variabel independen X2.

Pengukuran pada variabel X1 yaitu dengan menghitung jumlah temuan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dapat diukur dengan TEMUAN_{it} dimana variabel yang mengukur jumlah temuan audit yang terkait dengan laporan keuangan di

Kementerian/Lembaga ke-i pada tahun. Nilai ini diperoleh dari pencatatan jumlah temuan audit yang didapat selama proses pemeriksaan, yang meliputi berbagai kategori temuan seperti temuan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (Furqan *et al.*, 2020).

$$\text{TEMUAN}_{it} = \text{Jumlah total temuan audit yang ditemukan pada Kementerian/Lembaga}$$

Pengukuran pada variabel X2 yang merupakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, diukur dari persentase jumlah rekomendasi pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan dibagi dengan jumlah total rekomendasi pemeriksaan seperti yang digunakan oleh (Furqan *et al.*, 2020).

$$\text{TLHP} = \frac{\text{Jumlah TLHP dari BPK yang sesuai dengan rekomendasi}}{\text{Jumlah rekomendasi TLHP yang diberikan oleh BPK}} \times 100\%$$

3.3.2 Variabel Dependen dan Pengukuran

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen (Suliyanto, 2011). Variabel dependen pada penelitian ini adalah korupsi yang disebut Y. Pengukuran pada variabel ini yaitu menggunakan kasus korupsi yang tercatat di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Tingkat korupsi dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah kasus korupsi yang terjadi pada masing-masing Kementerian/Lembaga dalam periode pengamatan (Mauro, 1995).

$$\text{Korupsi}_{it} = \sum \text{Kasus Korupsi}_{it}$$

3.3.3 Variabel Mediasi dan Pengukuran

Variabel mediasi (Z) secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012). Variabel intervening pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang diukur dengan hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Budiman dan Amyar (2021) menyampaikan bahwa opini audit merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material. Variabel ini diukur berdasarkan opini audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dimana opini audit dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan skor empat, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan skor tiga, Tidak Wajar dengan skor dua, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/*Disclaimer*) dengan skor satu (Mardiasmo, 2018).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sedangkan korupsi yang terjadi di Kementerian/Lembaga diambil dari Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi maupun situs dari internet. Ini dikarenakan kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan inteprestasi hasil pengolahan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan Regresi Linear Berganda untuk mengukur Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan Regresi Linear Berganda dengan Data Panel yang didalam pengujiannya akan dilakukan dengan bantuan program *Eviews* dengan pendekatan model Mediasi Penuh atau Parsial (*Full/Partial Mediation Model*) (Baron & Kenny, 1986). Sebelum melakukan analisis data panel, data-data yang digunakan harus lolos dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Metode deskriptif analitis menurut Suliyanto (2011) adalah metode yang melihat dan menggambarkan lingkungan atau keadaan yang tampak nyata dalam perusahaan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas atau objek yang diteliti agar dapat diambil suatu simpulan. Pendekatan statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, merangkum, dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat memberikan informasi yang relevan. Tujuan utama analisis deskriptif adalah untuk menyusun data dalam bentuk yang terstruktur dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis deskriptif berfokus pada proses penggambaran dan penjabaran data, termasuk penyajiannya dalam bentuk tabel, grafik, atau ukuran statistik tertentu. Dalam fase ini, ukuran statistik seperti ukuran pusat, sebaran, dan lokasi data dibahas. Untuk membuat data tersaji mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya, analisis statistika deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Statistika deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti rata-rata (*mean*), jumlah (*sum*) simpangan baku (*standard deviation*), varians (*variance*), rentang (*range*), nilai minimum dan maximum dan lain sebagainya.

3.5.2 Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Oleh karena itu peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik normal probabiliti plot dan uji statistik melalui nilai *skewness* dari *descriptive statistic*. Melalui grafik, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas dengan grafik apabila tidak cermat dan hati-hati maka akan terjadi kemungkinan salah persepsi atas grafik yang terlihat karena secara visual akan terlihat normal. Sebaiknya analisis grafik dilengkapi dengan uji statistik, menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* lebih besar dari 5% maka data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013).

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala

multikolinier (Suliyanto, 2011). Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas dengan TOL (*tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$). Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kesalahan (error) pada satu waktu dengan kesalahan di waktu sebelumnya dalam model regresi. Jika ada hubungan tersebut, maka disebut autokorelasi. Untuk mendeteksinya, bisa digunakan uji Durbin-Watson. Uji ini hanya cocok digunakan untuk melihat hubungan kesalahan pada dua waktu yang berurutan (disebut autokorelasi tingkat satu). Namun, uji ini hanya bisa digunakan jika model regresi memiliki nilai konstanta (intersep) dan tidak ada variabel lain yang saling berkaitan dalam variabel bebas (independen).

3.5.3 Uji Analisi Jalur (Path Analysis)

Menurut Dumas & Edelsbrunner (2023) analisis jalur merupakan pengembangan dari regresi berganda yang bertujuan untuk memberikan estimasi besaran dan signifikansi hubungan sebab akibat dalam suatu set variabel. Analisis jalur sebagai

model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji kesesuaian matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Model ini digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran dan panah, di mana anak panah menunjukkan penyebab. Regresi diterapkan pada masing-masing variabel dalam model sebagai variabel tergantung, sementara yang lain sebagai penyebab. Bobot regresi diprediksikan dalam model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan penghitungan uji kesesuaian statistik. (VanderWeele & Vansteelandt, 2022). Langkah-langkah dalam analisis jalur adalah disesuaikan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menstandarkan semua data penelitian dimana semua variabel penelitian ini terukur.
2. Menggambarkan rancangan diagram jalur sebagaimana yang dijabarkan di atas.
3. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari pengolahan data tersebut di atas, sebagai berikut:
 - a. Pengaruh langsung : Pengujian pengaruh langsung yang dilakukan dengan Uji Partial (Uji t) untuk mengetahui pengaruh tiap – tiap variabel X terhadap variabel Y secara partial.
 - b. Pengaruh tidak langsung : Untuk mengetahui adanya hubungan tidak langsung dengan melakukan perkalian terhadap koefisien jalur pertama dengan koefisien jalur selanjutnya. Apabila hasil perkalian tersebut hasilnya lebih besar dari koefisien hubungan langsungnya maka berarti variabel Y tersebut adalah variable intervening.

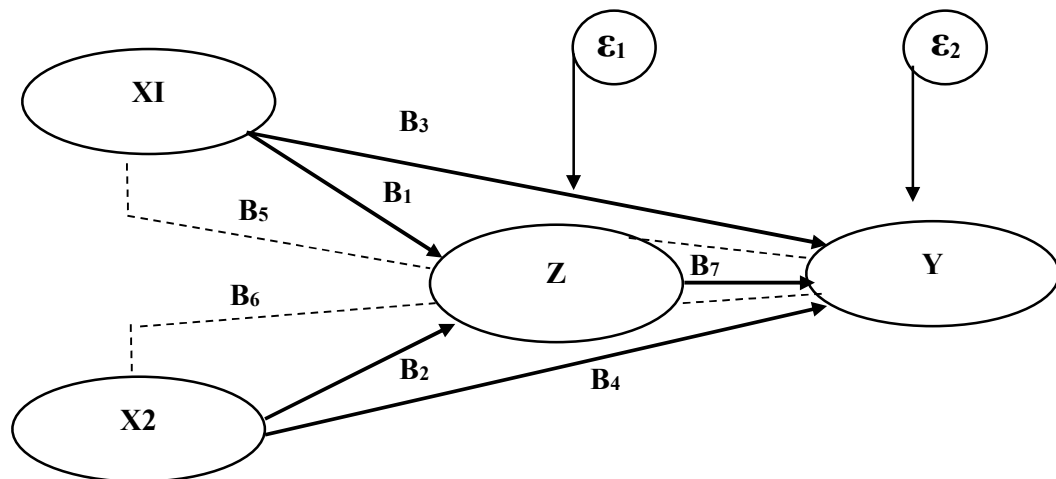
Menurut Ghozali (2013), untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab- akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Dalam analisis model

jalur (*path*), langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun model jalur untuk menguji apakah terdapat efek mediasi (*intervening*) dalam hubungan antar variabel.

Model jalur digambarkan dalam bentuk diagram yang menghubungkan variabel independen (bebas), variabel mediasi (perantara), dan variabel dependen (tergantung). Hubungan antar variabel tersebut divisualisasikan menggunakan anak panah; di mana anak panah satu arah merepresentasikan hubungan kausal antara variabel eksogen (independen) dan endogen (dependen). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh mediasi, dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien jalur. Koefisien jalur merupakan koefisien regresi terstandarisasi yang menunjukkan besarnya pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien jalur diperoleh melalui penyusunan dua persamaan struktural, masing-masing merepresentasikan hubungan yang dihipotesiskan dalam model (Ghozali, 2013).

Dibawah ini merupakan model jalur yang dibuat berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Analisis Jalur

Persamaan substrukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Z = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1$$

$$Y = \alpha + b_3 X_1 + b_4 X_2 + b_7 Z + e_2$$

Keterangan:

X1 = Temuan Audit

X2 = Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Z = Kualitas Laporan Keuangan

Y = Korupsi

b1 = Koefisien jalur X1 ke Z

b2 = Koefisien jalur X2 ke Z

b3 = Koefisien jalur X1 ke Y

b4 = Koefisien jalur X2 ke Y

b7 = Koefisien jalur Z ke Y

e1 = error struktur 1

e2 = error struktur 2

3.5.4 Interpretasi Analisis Jalur

Uraian mengenai interpretasi analisis jalur disajikan pada bagian berikut ini:

1. Pengaruh Langsung

Untuk menghitung pengaruh langsung, digunakan formula sebagai berikut:

- a. Pengaruh variabel temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan. $X_1 \rightarrow Z$.
- b. Pengaruh variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan. $X_2 \rightarrow Z$.
- c. Pengaruh variabel temuan audit terhadap korupsi. $X_1 \rightarrow Y$.
- d. Pengaruh variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi. $X_2 \rightarrow Y$.
- e. Pengaruh variabel kualitas laporan keuangan terhadap korupsi. $Z \rightarrow Y$.

2. Pengaruh Tidak Langsung

Untuk menghitung pengaruh tidak langsung, digunakan formula sebagai berikut:

- a. Pengaruh variabel temuan audit terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan. $X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y$.
- b. Pengaruh variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan. $X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y$.

3. Pengaruh Total

Dalam menghitung pengaruh total, digunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pengaruh variabel temuan audit terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan:
Total pengaruh koefisien jalur = pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung $[b_5 + (b_1 \times b_7)]$.
- b. Pengaruh variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi melalui kualitas laporan keuangan:
Total pengaruh koefisien jalur = pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung $[b_6 + (b_2 \times b_7)]$.

Dalam penentuan terdapat atau tidaknya efek mediasi atau intervening dalam model, dapat dilihat dari kriteria seperti dibawah ini yaitu:

1. Jika nilai pengaruh tidak langsung koefisien jalur $>$ nilai pengaruh langsungnya, maka terdapat hubungan *intervening*/mediasi.
2. Jika nilai pengaruh tidak langsung koefisien jalur $<$ nilai pengaruh langsungnya, maka tidak terdapat hubungan *intervening*/mediasi.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dua jenis pengujian yaitu Uji Parsial (Uji t) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (Independent) secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent) pada tingkat signifikansi

0,05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian, yaitu : (Yanti dan Ardillah, 2024).

Hipotesis : $H_0 : \beta_i = 0$ artinya masing-masing variabel bebas tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel terikat.

$H_1 : \beta_i \neq 0$ artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh yang signifikan dari variabel terikat.

- a. Bila probabilitas $> \alpha 5\%$ atau $t \text{ hitung} \leq \text{tabel}$ maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H_0 terima, H_a tolak).
- b. Bila probabilitas $< \alpha 5\%$ atau $t \text{ hitung} > \text{tabel}$ maka variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H_0 tolak, H_a terima).

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Nilai R^2 yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen dengan lebih baik, sehingga model yang digunakan menjadi lebih kuat secara statistik. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.5.6 Uji Sobel

Pengujian hipotesis mediasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) sebagaimana dikutip dalam Ghozali (2018), yang dikenal sebagai Uji Sobel (*Sobel Test*). Uji Sobel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel mediasi (M).

Dalam konteks pengolahan data menggunakan perangkat lunak *EViews*, pengaruh tidak langsung (indirect effect) tidak diperoleh secara otomatis, sehingga perhitungannya dilakukan secara terpisah dengan menggunakan alat bantu *Calculation for the Sobel Test* yang tersedia pada laman <http://quantpsy.org/>. Perhitungan tersebut memerlukan informasi berupa nilai koefisien regresi (*original sample*) dan *standard error* dari hasil estimasi regresi antara variabel independen terhadap variabel mediasi, serta antara variabel mediasi terhadap variabel dependen. Variabel mediasi dinyatakan mampu memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apabila nilai statistik Uji Sobel $\geq 1,96$ pada tingkat signifikansi 5 persen (Ghozali, 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis jalur dan pengujian hipotesis H1–H7, dapat disimpulkan bahwa:

1. Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Semakin tinggi jumlah dan tingkat materialitas temuan audit yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, semakin rendah kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan audit mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta permasalahan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan, yang secara langsung menurunkan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian, temuan audit berfungsi sebagai indikator penting atas rendahnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik.

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Tingginya tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan mencerminkan komitmen manajemen dalam memperbaiki kelemahan yang diidentifikasi auditor, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sistemik. Pelaksanaan TLHP yang efektif berkontribusi pada perbaikan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta memperkuat sistem pengendalian intern. Dengan demikian, TLHP merupakan mekanisme penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik secara berkelanjutan.

3. Temuan Audit berpengaruh positif terhadap tingkat Korupsi pada Kementerian/Lembaga.

Hubungan positif ini tidak menunjukkan bahwa audit mendorong terjadinya korupsi, melainkan mencerminkan peran audit sebagai instrumen deteksi terhadap praktik korupsi dan penyimpangan tata kelola yang sebelumnya

tersembunyi. Semakin banyak temuan audit yang diungkapkan, semakin besar pula indikasi bahwa risiko korupsi dan kelemahan pengendalian internal berhasil diidentifikasi. Dengan demikian, temuan audit dapat dipahami sebagai cerminan tingkat penyimpangan dan risiko tata kelola yang melekat pada entitas sektor publik.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Korupsi pada Kementerian/Lembaga.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian rekomendasi audit yang bersifat administratif belum secara langsung mampu menekan praktik korupsi. TLHP cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal tanpa disertai perubahan substantif dalam sistem, prosedur, dan perilaku organisasi. Oleh karena itu, TLHP belum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian korupsi apabila tidak didukung oleh penguatan pengawasan, penegakan sanksi, dan reformasi tata kelola yang lebih mendalam.

5. Temuan Audit tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan.

Artinya, meskipun Temuan Audit terbukti memengaruhi kualitas laporan keuangan, pengaruh tersebut tidak berlanjut hingga memengaruhi perilaku koruptif. Kualitas laporan keuangan lebih merepresentasikan tingkat kepatuhan administratif dan kualitas teknis pelaporan, sehingga tidak cukup kuat untuk menjadi mekanisme transmisi pengaruh audit terhadap pengendalian korupsi. Dengan demikian, Kualitas Laporan Keuangan tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Temuan Audit dan Korupsi.

6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Korupsi melalui Kualitas Laporan Keuangan.

Walaupun TLHP berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, perbaikan tersebut belum mampu menekan tingkat korupsi secara signifikan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan melalui TLHP lebih berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas formal, bukan sebagai alat pengendalian perilaku koruptif. Oleh karena itu, Kualitas Laporan Keuangan

tidak terbukti berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara TLHP dan Korupsi.

7. Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Korupsi pada Kementerian/Lembaga.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan, yang tercermin dari opini audit yang baik, tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan praktik korupsi. Kualitas laporan keuangan lebih mencerminkan akuntabilitas administratif dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, sementara praktik korupsi sering terjadi melalui mekanisme non-akuntansial yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan belum dapat dijadikan indikator yang andal untuk menjelaskan atau mengendalikan tingkat korupsi di sektor publik.

Nilai *R-squared* pada Sub Struktural I yaitu Temuan Audit (X1) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X2) mampu menjelaskan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Z) sebesar 6.9568%, sedangkan sisanya yaitu 93.0432% ($100 - \text{nilai adjusted R Square}$). Selanjutnya nilai *R-squared* pada Sub Struktural II menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Temuan Audit (X1), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Z) mampu menjelaskan variabel Korupsi (Y) sebesar 1.5212%, sedangkan sisanya yaitu 98.4788% ($100 - \text{nilai adjusted R Square}$). Rendahnya nilai koefisien determinasi ini mengindikasikan bahwa korupsi pada Kementerian/Lembaga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Akuntansi / Teknologi Informasi Keuangan serta Kompleksitas Anggaran yang jauh lebih luas daripada variabel-variabel yang diuji pada model penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait ketersediaan informasi, beberapa data yang dibutuhkan tidak tersedia secara lengkap dan disampaikan pada situs resmi BPK, sehingga sejumlah objek penelitian harus dikeluarkan dari proses pengolahan data karena tidak memenuhi kriteria kelengkapan sampel yang telah ditetapkan. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi luasnya cakupan analisis

dan dapat membatasi tingkat representativitas hasil penelitian terhadap keseluruhan populasi Kementerian/Lembaga.

Keterbatasan penelitian ini tercermin dari hasil pengujian pada Tabel 4.20, yang menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Korupsi pada Kementerian/Lembaga, serta didukung oleh nilai koefisien determinasi yang relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi masih terbatas, sehingga sebagian besar variasi korupsi dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BPK, beberapa data yang dibutuhkan tidak tersedia secara lengkap dan disampaikan pada situs resmi BPK, sehingga sejumlah objek penelitian harus dikeluarkan dari proses pengolahan data karena tidak memenuhi kriteria kelengkapan sampel yang telah ditetapkan. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi luasnya cakupan analisis dan dapat membatasi tingkat representativitas hasil penelitian terhadap keseluruhan populasi Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, minimnya literatur pendukung menyebabkan dasar teoretis yang digunakan mungkin belum cukup kuat untuk menjelaskan mediasi Kualitas Laporan Keuangan dalam hubungan antara audit dan korupsi pada Kementerian/Lembaga di Indonesia, sehingga interpretasi hasil penelitian harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan pengembangan model dengan cakupan variabel yang lebih luas dan didukung oleh referensi empiris yang lebih memadai, misalnya dengan memasukkan variabel seperti efektivitas pengendalian internal, integritas aparatur, transparansi pengadaan, atau kualitas pengawasan internal, sehingga hubungan antarvariabel dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan selaras dengan perkembangan literatur.

Selain itu, model mediasi penuh yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan tidak mampu memediasi hubungan antara Temuan Audit maupun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kerangka teoritis yang

menempatkan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel perantara belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas mekanisme sebab-akibat yang terjadi dalam lingkungan sektor publik Indonesia. Ketidakmampuan model untuk menangkap peran mediasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengaruh Temuan Audit dan TLHP terhadap Korupsi kemungkinan berlangsung melalui jalur lain yang melibatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP), kualitas perencanaan dan penganggaran, sistem informasi akuntansi / teknologi informasi keuangan serta kompleksitas anggaran yang jauh lebih luas daripada struktur dalam model penelitian ini.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Praktis bagi Kementerian/Lembaga

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mencegah praktik korupsi, antara lain:

1. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Temuan Audit.
Meskipun tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) telah dilakukan, penelitian menunjukkan bahwa TLHP belum secara signifikan menurunkan tingkat korupsi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga perlu memastikan bahwa setiap temuan audit tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi juga diselesaikan secara substantif agar perbaikan tata kelola benar-benar terjadi.
2. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal.
Temuan audit yang tinggi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan berasosiasi positif dengan korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengendalian internal, misalnya melalui pemisahan tugas yang jelas, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta prosedur pengawasan yang lebih ketat di setiap unit kerja.
3. Mengoptimalkan Fungsi Audit untuk Mengungkap Risiko, Bukan Hanya Pemenuhan Regulasi.
Hasil penelitian menunjukkan temuan audit berpengaruh positif terhadap

korupsi. Kementerian/Lembaga perlu memanfaatkan temuan audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi area rawan korupsi dan mengambil tindakan pencegahan secara proaktif, bukan hanya menanggapi audit sebagai kewajiban administratif.

4. Meningkatkan Budaya Akuntabilitas dan Integritas.

Perbaikan prosedur administratif harus disertai perubahan perilaku.

Kementerian/Lembaga perlu menanamkan budaya akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi di seluruh level organisasi agar tindak lanjut temuan audit berdampak nyata terhadap pencegahan praktik korupsi.

5.3.2 Saran bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh BPK untuk meningkatkan efektivitas audit serta peran pengawasannya terhadap Kementerian/Lembaga, terutama dalam hal pengendalian korupsi dan peningkatan kualitas laporan keuangan, yaitu:

1. Memperkuat Fungsi Audit sebagai Mekanisme Deteksi Risiko

BPK perlu menekankan peran audit tidak hanya sebagai kewajiban formal atau prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi risiko penyimpangan dan potensi korupsi secara lebih proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan fokus audit pada area yang memiliki risiko tinggi, menggunakan metode audit berbasis risiko, serta menyajikan rekomendasi yang bersifat preventif dan strategis.

2. Meningkatkan Kualitas Rekomendasi Audit

Rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan sebaiknya tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga memberikan arahan konkret untuk perbaikan sistem, pengendalian internal, dan kepatuhan substansial. Rekomendasi yang jelas, terukur, dan prioritasnya disesuaikan dengan tingkat risiko, akan mempermudah Kementerian/Lembaga dalam menindaklanjuti temuan audit secara efektif.

3. Mendorong Integrasi Audit dengan Sistem Pengendalian Internal dan Penegakan Hukum

BPK dapat bekerja sama dengan aparat pengawasan internal Kementerian/Lembaga serta lembaga penegak hukum untuk memastikan temuan audit yang berkaitan dengan potensi korupsi ditindaklanjuti secara substantif. Integrasi ini akan meningkatkan efektivitas audit sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai regulasi.

4. Meningkatkan Transparansi dan Komunikasi Temuan Audit

BPK disarankan untuk menyajikan temuan audit dengan cara yang lebih komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Penyampaian informasi yang transparan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Kementerian/Lembaga, tetapi juga memudahkan publik dan prinsipal dalam memantau pengelolaan keuangan negara.

5.3.3 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian ini, beberapa saran untuk penelitian berikutnya antara lain:

1. Memperluas Variabel Penelitian

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi korupsi dan kualitas laporan keuangan, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, pengawasan internal, atau sistem pengendalian risiko. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik korupsi dan kualitas akuntabilitas keuangan.

2. Menggunakan Data dan Metode yang Lebih Variatif

Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan data yang lebih luas, baik dalam hal periode pengamatan, jumlah Kementerian/Lembaga, maupun jenis laporan keuangan yang dianalisis. Selain itu, metode penelitian gabungan (mixed-methods) yang mengkombinasikan analisis kuantitatif dan wawancara kualitatif dapat memberikan pemahaman lebih

mendalam tentang mekanisme hubungan antara audit, TLHP, kualitas laporan keuangan, dan korupsi.

3. Memperhatikan Faktor-Faktor Kualitatif serta Kondisi Kontekstual.

Penelitian mendatang disarankan untuk menambahkan pendekatan kualitatif, seperti wawancara dengan auditor, pejabat pengelola keuangan, dan pihak terkait, untuk menggali alasan di balik perilaku tindak lanjut audit atau praktik korupsi. Hal ini dapat memperkaya pemahaman mengenai konteks organisasi dan faktor non-teknis yang memengaruhi efektivitas audit.

4. Analisis Perbedaan antar Kementerian/Lembaga

Penelitian selanjutnya dapat meneliti perbedaan pengaruh Temuan Audit dan TLHP terhadap Korupsi di berbagai Kementerian/Lembaga dengan karakteristik berbeda, misalnya berdasarkan ukuran anggaran, kompleksitas kegiatan, atau tingkat otonomi. Analisis ini dapat memberikan *insight* yang lebih spesifik terkait strategi pengawasan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah. (2007). *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Sinar Grafika.
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, C. H. (2017). *Auditing and Assurance Services* (16th ed.). Pearson.
- Aminah, Suhardjanto, D., Rahmawati, & Winarna, J. (2022). The effect of the quality of local government financial reports on corruption moderated with the audit findings. *Economic Annals-XXI*, 197(5–6), 45–50.
<https://doi.org/10.21003/ea.V197-07>
- Astutik, M., & Yulianto, C. (2021). Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi Kemampuan Kerja. *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 4(1).
<https://doi.org/10.26533/jmd.v4i1.750>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. LN.2017/NO.1, TLN NO.6010, LL BPK RI: 7 HLM.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik : suatu pengantar*. Erlangga.
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>

- Cinintya, C. (2022). *Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*. 2721–2735.
- Cohen, A., & Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. *Australian Accounting Review*, 20(3), 296–307.
<https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00092.x>
- Deliza Henny, S. D., & Yanti Rebecka, & H. B. Y. (2021). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 227–244.
<https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9402>
- Din, M., Munawarah, Ghazali, I., & Achmad, T. (2017). The Follow Up of Auditing Results, Accountability of Financial Reporting and Mediating Effect of Financial Loss Rate: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. *EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL*, XX(Issue 4A), 443–459. <https://doi.org/10.35808/ersj/846>
- Djanegara, M. S., Sekolah, D., Ilmu, T., & Kesatuan, E. (2017). PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN. *XXI*(03), 461–483.
- Dumas, D., & Edelsbrunner, P. (2023). How to Make Recommendations for Educational Practice from Correlational Data Using Structural Equation Models. *Educational Psychology Review*, 35(2), 48.
<https://doi.org/10.1007/s10648-023-09770-0>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
<https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ketu). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harti Budi Yanti, B. I. A. (2024). The Impact of Audit Findings and Recommendation Follow-Up on Public Service Quality: An Empirical Investigation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 19. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2024.v19.i02.p06>
- Hayes, A. F. (2017). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis. In *Guilford Publications* (Second Edi).
- Imtinan, G., Hasibuan, D. H. M., Akuntansi, P. S., & Bisnis, I. (2021). *Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian*. 9(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.488>
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>
- Isnadiva, S. M., & Haryanto, H. (2021). HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Fitriani, N. (2019). The effect of audit results and financial performance on corruption level moderated by government size. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(3), 250–259. <https://doi.org/10.35808/ijeba/323>

- Kiswanto, K., Semarang, U. N., Hajawiyah, A., & Semarang, U. N. (2019). *The Effect of Audit Results and Financial Performance on Corruption Level Moderated by Government Size The Effect of Audit Results and Financial Performance on Corruption Level Moderated by Government Size*. September. <https://doi.org/10.35808/ijebe/323>
- Kompas.com. (2024). *Tom Lembong Tersangka, Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/05430961/tom-lembong-tersangka-begini-kronologi-kasus-korupsi-impor-gula?page=all>
- Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- L.I. (2020). *Ragam Opini BPK*. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, J. H. S. (2003). *The Practice of Modern Internal Auditing* (5th, illustr ed.). Institute of Internal Auditors.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Edisi Terb). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Muhamad Zainul Arifin. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Prakti)* (Tim Kreatif Publica Institute (ed.)). Publica Indonesia Utama.
- Nair, D. S. (2025). Improving critical thinking of teacher–trainees through a strength-based program: a positive psychology approach. *Journal of Research in Innovative Teaching and Learning*. <https://doi.org/10.1108/JRIT-02-2025-0041>

- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews. 1 ed.* Madenatera.
- Nehme, R., Kozah, A. C. E., & Khalil, S. (2025). Dysfunctional audit behavior: exploring the impact of longitudinal work experience and gender. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 21(3), 567–592.
<https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2023-0196>
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Pertiwi, P. K., & Wibowo, P. (2023a). *Government Reporting and Quality of Public Services : Are They Twins ?* 24(1), 1–24.
<https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16193>
- Pertiwi, P. K., & Wibowo, P. (2023b). Government Reporting and Quality of Public Services: Are They Twins? *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 1–24. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16193>
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Rini, R., & Damiaati, L. (2017). *Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia*. 4(1), 73–90.

Ross L. Watts & Jerold L. Zimmerman. (2006). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *Accounting Review*, 53.

Roviyantie, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal.Unsil.Ac.Id*.

Ruth Pranadipta, & Natsir, K. (2023). Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(2), 276–289. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289>

Safrida Yuliani, N. N. & U. B. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 3. No, 206–220.

Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik Multivariat dalam Riset*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Setyaningrum, D., & Agustina, N. (2020). *Determinants Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia*.
<https://www.researchgate.net/publication/341227260>

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.

Suhardjanto, D., Purwanto, N. A., Sari, K., & Setiany, E. (2018). Corporate governance and social disclosure: a comparative study of listed hospitality industries in South East Asia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1/2), 21. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2018.092495>

- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit Andi Offset.
- Tania Angela, Marsellisa Nindito, H. K. (2023). PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*, 4.
- Tiurmaida, J., Murwaningsari, E., Simanjuntak, B., & Mayangsari, S. (2021). Determinant of Indonesia Government Financial Reporting Quality. *Journal of Business and Management Review*, 2(9), 595–604.
<https://doi.org/10.47153/jbmr29.2192021>
- Transparency International. (2023). *No Title*. <https://www.transparency.org/en/>
- Tresnawati, F., & Nur Apandi, R. N. (2016). PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA REPUBLIK INDONESIA). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4017>
- VanderWeele, T. J., & Vansteelandt, S. (2022). A Statistical Test to Reject the Structural interpretation of a Latent Factor Model. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 84(5), 2032–2054.
<https://doi.org/10.1111/rssb.12555>